

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil & Sejarah Kabupaten Tulungagung

Dahulu sekitar tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung mendapatkan penghargaan dari Raja Dhaha terakhir yakni Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Dhaha. Penghargaan yang diberikan oleh raja tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "*Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa*" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal dikeluarkannya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung yang telah dimulai sejak tahun 2003.¹

Bupati Tulungagung beserta para pengikutnya (1880-1920) Di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, terdapat peninggalan berupa Candi Gayatri. Candi tersebut adalah tempat yang digunakan untuk mencandikan Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja (Tribhuwanatunggadewi), sekaligus nenek dari Hayam Wuruk

¹Sejarah Kabupaten Tulungagung, diakses melalui situs website Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, http://tulungagung.go.id/?page_id=4613 pada hari Sabtu tgl 18 Mei 2019, pukul 07.59 WIB.

(Rajasanegara), raja yang memerintah Kerajaan Majapahit pada masa keemasannya dahulu.²

Asal muasal nama Kabupaten Tulungagung sendiri terdapat dua versi cerita dalam penamaan Kabupaten Tulungagung. Versi pertama adalah nama "Tulungagung" dipercaya berasal dari kata "Pitulungan Agung" (pertolongan yang agung). Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren.³

Sedangkan, versi kedua nama Tulungagung berasal dua kata, *tulung* dan *agung*, *tulung* artinya sumber yang besar, sedangkan *agung* artinya besar. Dalam pengartian berbahasa Jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya Bendungan Niyama di Tulungagung Selatan oleh pendudukan tentara Jepang, di mana-mana di daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air disana, setiap kawasan banyak yang tergenang air, baik musim kemarau maupun musim penghujan.⁴

Dugaan yang paling kuat mengenai asal-muasal nama kabupaten ini adalah versi kedua. Penamaan ini sendiri dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah di tempat sekarang ini.

² *ibid*

³ *Ibid*

⁴ *ibid*

Sebelumnya ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo juga berarti sumber air). Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 Masehi. Tulungagung sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak pada 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung

Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Timur: Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552

m (dpl). Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.⁵

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Kecamatan terdiri dari: Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Boyolangu, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Karangrejo, Kauman, Gondang, Pagerwejo, dan Sendang.⁶

2. Profil Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) Tulungagung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulunya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah Partai Politik berbasis Islam di Indonesia yang berawal dari gerakan-gerakan dakwah diberbagai kampus Indonesia. Slogan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah “berkhitmat untuk rakyat” dan didiriakn tanggal 21 mei 1998, berupa penggabungan dari Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa mengalami konflik internal.

⁵Sejarah asal-muassal nama Kabupaten Tulungagung yang diakses melalui sumber https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung pada hari Minggu tanggal 19 mei 2019, pukul 09.30 WIB.

⁶*Ibid*

Bisa dikatakan pelopor gerakan ini adalah Muhammad Natsir, yaitu mantan perdana menteri Indonesia dari sejarah Partai Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960an. Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiah (DDII) pada tahun 1967. Pada awalnya lembaga ini memfokuskan diri pada usaha untuk mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling penting adalah dalam memprakarsai kelahiran lembaga Mujtahid Dakwah sebagai afiliasinya, dengan dipimpin Immanuel Ibrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan bertempat di Masjid Salman ITB.⁷

Memasuki tahun 1985, Orde Baru mewajibkan semua organisasi massa atau ormas menjadikan Pancasila sebagai asas sehingga sejumlah tokoh Islam marah dan menyebut rezim Orba telah melakukan politik Islam. Di saat yang sama, jamaah Tarbiyah mendapat momentum di kalangan mahasiswa yang menjadi aktifis di kampus, yaitu Mustafa Kamal memenangkan pemilihan mahasiswa untuk fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI sebagai kader jamaah pertama yang mendapat kekuasaan di tingkat universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah yang juga seorang kader Jamaah Tarbiyah, terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa UI.⁸

Para anggota Jamaah Tarbiyah lalu mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang menjadi unit – unit kegiatan mahasiswa secara

⁷Sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diakses melalui : <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-partai-pks> diakses minggu tanggal 19 Mei 19 pukul 18.40 Wib

⁸ *Ibid*

resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, misalnya UI yang dilakukan terutama oleh para aktivis dari Forum Studi Islam. Pada saat itu, sebutan ‘usrah’ yang berarti ‘keluarga’ kerap digunakan untuk menyebut kelompok – kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan menggunakan sistem sel seperti Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader – kadernya, dan juga mulai dilakukan berbagai pelatihan untuk anggota. Usrah adalah berbagai kelompok kecil yang saling berhubungan secara dekat, dan digabungkan melalui suatu struktur hierarkis. Kebanyakan anggotanya tidak saling mengenal anggota kelompok lainnya. Melalui struktur organisasi semacam ini, aktivitas dakwah kampus berkembang semakin pesat dan masjid – masjid kampus menjadi pusat aktivitasnya

Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS)⁹

Berbagai faksi dan kubu di dalam LDK kemudian sepakat untuk membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSDLK) pada tahun 1986. Sejarah partai PKS dimulai ketika FSLDK mengadakan pertemuan berkala setiap tahunnya. Pada pertemuan tahunan ke 10 di Malang tahun 1998, momentum tersebut dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI yang dipimpin oleh Fahri Hamzah muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal dalam

⁹Sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diakses melalui : <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-partai-pks> diakses minggu tanggal 19 Mei 19 pukul 18.40 Wib

menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto. Tidak lama setelah mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI mempertimbangkan pendirian sebuah partai Islam. Partai tersebut lalu dinamakan Partai Keadilan (PK). KAMMI dan PK menyatakan dengan tegas bahwa tidak memiliki hubungan formal, walaupun para tokoh elite KAMMI berkontribusi dalam pembentukan PK.

Deklarasi PK dilakukan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada 20 Juli 1998 dengan Presiden pertamanya yaitu Nurmahmudi Isma'il. Pada pemilu 1999, PK mendapatkan perhatian dari banyak pihak sebagai satu – satunya parpol yang memiliki struktur kepengurusan yang transparan, terorganisir dengan rapi dan mempunyai agenda program yang jelas. Tidak seperti berbagai partai islam lain yang bergantung pada ketokohan satu figur, PK justru menegaskan pentingnya egalitarianisme dalam Islam dan kekuatan kolektif, juga tidak banyak memberi ruang untuk tampilnya seorang pemimpin kharismatik. Ciri khas PK adalah minimnya tokoh yang memiliki magnet yang berpotensi untuk dipilih, tetapi para kader dan simpatisannya dituntut untuk patuh terhadap norma – norma agama dan loyal pada garis partai.

Dalam keikutsertaan sebagai parpol¹⁰ pada Pemilu legislatif 1999, PK mendapatkan 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional, dan mendapatkan jatah sebanyak 7 kursi di DPR. Walaupun mendapatkan suara, tetapi PK gagal untuk memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen sehingga terpaksa bergabung melalui stembus accord dengan delapan parpol berbasis Islam lainnya pada bulan Mei 1999. Kemudian Nurmahmudi ditawarkan jabatan sebagai Menteri Kehutanan dalam Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan Oktober 1999. Tawaran tersebut diterima dan jabatan presiden PK diserahkan kepada Hidayat Nur Wahid, doktor lulusan Universitas Islam Madinah sejak 21 Mei 2000.

Kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen di sejarah pemilu di Indonesia pada tahun 1999 membuahkan konsekuensi penggantian nama sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi untuk Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau setingkat propinsi dan tingkat Dewan Pimpinan Daerah atau setingkat kabupaten dan kota. Sehari setelahnya, PK telah resmi mengubah namanya

¹⁰Sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diakses melalui : <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-partai-pks> diakses minggu tanggal 19 Mei 19 pukul 18.40 Wib

menjadi PKS. Simak juga sejarah dari beberapa parpol islam lain seperti sejarah partai PPP , sejarah partai PKB dan sejarah partai PAN.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung

a. Kepengurusan Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung terletak di desa kepatihan kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, tepatnya di jalan Letnan Jendral Suprpto no 96 Kapatihan-Tulungagung. Adapun terkait dengan lokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada disebelah barat barat masjid Al-Muslimun Kapatihan.¹¹

Dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) BAB XI Dewan Pengurus Daerah (kabupaten) pasal 17 ayat 2 menyebutkan dewan pengurus tingkat daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dewan Pengurus Daerah (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung, merupakan Dewan Pengurus Daerah (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pengurus Daerah adalah ketua majelis pertimbangan Daerah.

¹¹ Mengantarkan surat izin penelitian sekaligus melakukan observasi secara langsung di ketua Kepengurusan bagian Keperempuanan , pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 09.45 WIB.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung, menaungi Dewan Pengurus Ranting yang berada dalam kekuasaannya, Dewan Pengurus Ranting merupakan kepengurusan partai pada tingkat kecamatan, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten tulungagung berdiri sejak tanggal 20 April 2002, jadi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gorontalo sudah berusia 17 tahun.

Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu struktur organisasi partai tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdiri, Majelis Syuro, Dewan Syariah, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat, sedangkan struktur organisasi tingkat propinsi terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukan pada tingkat propinsi, dalam ruang lingkup kepengurusan tingkat propinsi atau wilayah didirikan struktur organisasi tingkat daerah atau kabupaten/kota yang berkedudukan di kabupaten atau kota.

Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang kaderisasi atau pembinaan kader, bidang pembangunan keumatan, bidang kebijakan publik dan pengembangan ekonomi kewirahusahaan, bidang kependuan

dan olahraga, bidang generasi muda dan profesi, bidang perempuan, bidang kelembagaan sosial, dan Dewan Pakar. Struktur atau susunan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung sebagai berikut ¹²:

no	Nama	Jabatan
1	Renno mardiputro	Ketua umum
2	Adrianto	Wakil Ketua Umum
3	Faruuk Tri Fauzi	Sekretaris Umum
4	Wahyu Hermanto	Bendahara Umum
5	Jiman Suhartana	Ketua Bidang Kaderisasi
6	Irfan Dwi Kurniawan	Ketua Bidang Kepemudaan
7	Slamet Riadi	Ketua Kepanduan dan Olah raga
8	Atik Wijayanti	Ketua Bidang Perempuan dan ketahanan Keluarga
9	Rretno Rakhmawati	Sekretaris Bidang Perempuan dan ketahanan Keluarga
10	Enik Nafiah	Ketua Bagian peningkatan kapasitas Perempuan
11	Eni Erawati	Ketua Bagian ketahanan keluarga dan perlindungan anak
12	Sutami ningsih	Ketua bagian kajian perempuan

¹² Berdasarkan Surat Keputusan DPW PKS Jawa Timur nomor 119/D/SKEP/AM-PKS/1437 tentang Penetapan Dewan Pengurus daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung 2015-2020

		anak dan keluarga
13	Ika veristiyabudi	Ketua bagian hubungan kelembagaan perempuan
14	Sujadi	Keua bidang pemengan pemilu dan pilkada
15	Sutikno	Ketua bidang hubungan masyarakat
16	Sih penpri	Ketua bidang Politik hukum dan keamanan
17	Ahmad Badrun	Keta bidang pembangunan keumatan dan dakwah
18	Eko cahyowibowo	Ketua bidang kesejahteraan rakyat
19	Anisah P	Ketua bagian pendidikan dan sosial
20	Ifa Johan Prasetyo	Ketua bidang pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi kaderp
21	Masduki	Ketua pekerja petani dan nelayan

Dalam penelitian ini, dapat ditemukan gambaran mengenai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk anggota Pengurus Partai di Kabupaten Tulunagung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Renno Madiputro¹³ pada Senin, 28 Mei 1 2019 dapat diketahui bahwa upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengisi ketrewakilan Anggota perempuan sebagai pengurus partai PKS di Kabupaten Tulungagung Masih belum sepenuhnya memenuhi kuota 30% di sebabkan banyak kendala sehingga masih banyak struktur yang kosong, bahkan stuktur kepengurusan PKS yang baru ini di oleh 5 dan satu orang perempuan. kurangnya kesediaan kader perempuan dari partai PKS untuk menjadi pengurus selain itu factor penghambat minimnya pendidikan pormal bagi kader partai PKS, sehingga memang belum sepenuhnya kami sebagai pengurus partai menjalankan amanat dari pada Undang-Undang no 2 tahun 2008 dan undang-undang no 2 tahun 2011.

Diterangkan oleh Ibu Ika veristiyabudi¹⁴ yang merupakan Ketua bagian hubungan kelembagaan perempuan dalam wawancara tanggal 30 mei 2019, bahwa sebenarnya dasar pertimbangan sehingga dicantumkannya angka 30% dalam UU No. 2 tahun 2008 Jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah karena dorongan dari organisasi-organisasi perempuan yang ada di Indonesia dulu yaitu KPPI (Kaukus Perempuan Politik

¹³ Wawancara secara langsung dengan Bpk Renno Madiputro selaku ketua DPC PKS Kabupaten Tulungagung bertempat di kantor DPC PKS Kepatihan-Tulungagung Senin, 28 Mei 1 2019, pukul. 09.30 pagi.

¹⁴ Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ika veristiyabudi ., selaku Ketua bagian hubungan kelembagaan perempuan pada hari kamis tanggal 30 mei 2019, pukul. 11.15 WIB.

Indonesia) yang sangat mengupayakan agar perempuan juga mendapat tempat yang setara dengan laki-laki di dunia politik. Karena selama ini laki-laki selalu mendominasi di berbagai bidang, semua jabatan-jabatan publik dan kursi yang ada di DPR, DPRD, ataupun dalam kepengurusan partai politik selalu didominasi oleh laki-laki. Diharapkan suatu hari akan dirancang sebuah undang-undang yang dimana perempuan dapat diberikan perlakuan khusus agar mendapat tempat yang setara dengan laki-laki. Akhirnya pada tahun 2008, tepatnya ketika UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disetujui oleh DPR RI, lahirlah sebuah undang-undang yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perempuan di Indonesia karena dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap partai politik yang ingin mengikuti pemilu harus menyertakan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

b. Kaderisasi perempuan dalam politik

Seperti pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Atik Wiyanti¹⁵ bahwa : Partisipasi politik perempuan dalam PKS Kabupaten Tulungagung mencakup 5 hal yaitu kontribusi perempuan, pemberdayaan perempuan, pengorganisasian perempuan, keterwakilan perempuan serta peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan. Kontribusi perempuan dimulai dengan rekrutmen perempuan. Pasal 9 ayat 1 AD/ART PKS dan ada bukannya sampean

¹⁵ Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ibu Atik Wiyanti ., selaku Ketua Bidang Perempuan dan ketahanan Keluarga pada hari kamis tanggal 30 mei 2019, pukul. 15.15 WIB.

dek hidaytul bisa baca sendiri pedoman khusus yang berkaitan dengan kaderisasi di DPC PKS kabupaten Tulungagung nanti saya pinjamkan.

c. Faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam politik

Dari wawancara yang dilakukan Penulis dengan Ibu Enik Nafiah¹⁶ yang juga merupakan Ketua Bagian peningkatan kapasitas Perempuan, diperoleh keterangan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga 30% keterwakilan perempuan tersebut tidak terpenuhi, yaitu :

- **Faktor budaya.** Bahwa selama ini budaya yang berkembang di Indonesia adalah budaya patriarki. Budaya patriarki adalah merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan wanita dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Jadi karena budaya ini yang menular bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, dan mempunyai otoritas kuat terhadap kontrol keluarga baik itu istri. Seorang istri tugasnya hanya di rumah, menjaga rumah, dan mengasuh anak. Karena budaya ini belum bisa hilang dari Indonesia sehingga sampai saat ini pemikiran

¹⁶ Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ibu Enik Nafiah., selaku Bagian peningkatan kapasitas Perempuan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, pukul. 09.15 WIB.

masyarakat bahwa perempuan belum partas dan tidak cocok untuk menduduki jabatan publik atau duduk di dalam DPRD.

- **Faktor Partai itu sendiri.**¹⁷ Partai terkadang tidak pernah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam kepengurusan partai, sehingga perempuan tersebut terkadang terabaikan. Jabatan seperti ketua umum, atau jabatan lainnya selalu didominasi oleh laki-laki. Dan perempuan selalu hanya diberikan kesempatan, kalau bukan menjadi seorang bendahara, pasti ditempatkan di bagian konsumsi. Jadi wajar kalau keterwakilan perempuan 30% di dalam DPRD tidak terpenuhi. Partai politik mempunyai fungsi yaitu sebagai komunikasi politik dan sosialisasi politik.

Dari kedua fungsi tersebut seharusnya partai politik memberikan selalu pendidikan politik kepada perempuan agar perempuan tersebut juga mendapatkan pendidikan hak-hak perempuan yang sebagaimana mestinya. Sehingga perempuan bisa dan mampu bersaing dengan laki-laki dalam hal kepengurusan maupun di dalam pencalonan anggota legislatif itu sendiri dan yang terutama perempuan mampu bersaing dalam hal pemenangan pemilu yang setiap 5 tahun sekali diadakan oleh Indonesia.

¹⁷ Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ibu Enik Nafiah., selaku Bagian peningkatan kapasitas Perempuan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, pukul. 09.15 WIB.

- **Faktor dari pribadi perempuan tersebut.**¹⁸ Setiap perempuan Indonesia masih banyak pesimis ataupun merasa takut terhadap dirinya sendiri. Terkadang mereka merasa bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan dapat menyaingi laki-laki dalam hal berpolitik. Motivasi dan dorongan moril masihlah sangat kurang di antara perempuan tersebut, sehingga mereka sulit untuk berkembang untuk ke depannya. Belum lagi di dalam sebuah partai politik tersebut dominasi perempuan sangatlah kecil sehingga mereka sulit untuk memperlihatkan dirinya di depan, dibandingkan laki-laki.
- **Faktor perekrutan kader-kader perempuan yang berkualitas.**¹⁹ Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat dengan adat timur seringkali menganggap bahwa dunia politik adalah ranah laki-laki, sehingga tidak selayaknya perempuan masuk ke dunia politik. Pemikiran semacam ini sebenarnya merupakan suatu pemikiran yang bias gender atau mencampur adukkan antara gender dan jenis kelamin. Padahal diantara keduanya berbeda.

Permasalahan ini seringkali menjadi masalah pula bagi Partai Politik dalam merekrut kader-kader perempuan yang berkualitas. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik

¹⁸ *ibid* (Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ibu Enik Nafiah., selaku Bagian peningkatan kapasitas Perempuan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, pukul. 09.15 WIB.)

¹⁹ *ibid*

masyarakat khususnya kaum perempuan masihlah kurang atau terlalu minim. Karena pandangan yang bias gender bahwa dunia politik adalah milik laki-laki akan menghambat afirmatif itu sendiri, meskipun telah dibuat suatu regulasi yang berpihak kepada perempuan. Namun kondisi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Partai Politik sendiri telah gagal dalam menjalankan fungsinya. Fungsi yang dimaksud yaitu fungsi pendidikan politik sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai Politik, ayat (1)²⁰

“ Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain :

- Peningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai Politik, Pasal 31 ayat (1)

” Jelas dan nyata bahwa Partai Politik memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi politik dalam kehidupan perpolitikan Indonesia dengan keadilan gender sesuai dengan pancasila. Karena apabila fungsi pendidikan politik telah terlaksana dengan baik, seharusnya Partai Politik tidak mengalami kesulitan dalam merekrut kader-kader perempuan yang berkualitas.”

Jadi 4 (empat) faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat sehingga keterwakilan 30% perempuan sangatlah sulit terpenuhi.

C. Temuan Penelitian

Dari paparan data penelitian diatas maka dapat ditemui beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan analisis yang mana akan dapat diketahui suatu bentuk pemahaman terkait hakikat dari partisipasi perempuan dalam Politik yang sesungguhnya, yang selama ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepatihan yang menjadi lokasi penelitian. Adapun yang menjadi temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terkait:

1. Kepengurusan Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung

Dapat ditemukan gambaran mengenai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk anggota Pengurus Partai di Kabupaten Tulungagung. keterwakilan Anggota perempuan sebagai pengurus partai PKS di Kabupaten Tulungagung Masih belum sepenuhnya memenuhi kuota 30% di sebabkan banyak kendala sehingga

masih banyak struktur yang kosong, bahkan stuktur kepengurusan PKS yang baru ini di oleh 5 dan satu orang perempuan. kurangnya kesediaan kader perempuan dari partai PKS untuk menjadi pengurus selain itu factor penghambat minimnya pendidikan pormal bagi kader partai PKS, sehingga memang belum sepenuhnya kami sebagai pengurus partai menjalankan amanat dari pada Undang-Undang no 2 tahun 2008 dan undang-undang no 2 tahun 2011.

2. Kaderisasi perempuan dalam politik

Partisipasi politik perempuan dalam PKS Kabupaten Tulungagung mencakup 5 hal yaitu kontribusi perempuan, pemberdayaan perempuan, pengorganisasian perempuan, keterwakilan perempuan serta peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan. Kontribusi perempuan dimulai dengan rekrutmen perempuan. Pasal 9 ayat 1 AD/ART PKS

3. Faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam politik

Sebagaimana yang peneliti temukan bahwa dalam hasil penelitian faktor yang menjadi pengahambat terdiri 4 fsktor penghambat pemenuhan 30% keterwakilan perempuan sampai hal tersebut tidak terpenuhi, yaitu

- Dari segi normatif, melihat Undang-Undang yang mengaturnya yaitu UU No. 2 Tahun 2008 Jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik bahwa di dalam undang-undang tersebut tidaklah efektif dalam proses implementasinya. Karena keharusan persyaratan 30% keterwakilan perempuan hanya dalam sebuah kepengurusan partai politik, ini sesuai Pasal 2 ayat (2), ayat (5) dan

Pasal 20. Sedangkan untuk duduk di Kursi DPR RI, tidak ada keharusan keterwakilan perempuan harus mencapai 30%;

- Faktor budaya, yaitu bahwa selama ini budaya yang berkembang di Indonesia adalah budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita;
- Faktor Partai Politik itu sendiri. Partai terkadang tidak pernah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam kepengurusan partai, sehingga perempuan tersebut terkadang terabaikan; dan
- Faktor dari pribadi perempuan tersebut. Perempuan Indonesia masih banyak yang pesimis ataupun merasa takut terhadap dirinya sendiri.